LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 7816 /SES/07/2019 Jakarta, 22 Juli 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Seleksi terbuka pengisian JPT Pratama LKPP

Yth.
1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama LPNK
2. Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia
Di tempat

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Tinggi Pratama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan di selenggarakan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana pengumuman terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan kepada Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud. Pendaftaran dimulai tanggal **22 Juli s.d 9 Agustus 2019**, dengan informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, dan tahapan Seleksi Terbuka dapat diakses di Laman https://rekrutmen.lkpp.go.id dan/atau www.lkpp.go.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Setya Budi Arijanta

Tembusan:
1. Kepala LKPP
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LKPP

Lampiran
Surat Sekretaris Utama LKPP
Nomor : 7810/SES/07/2019
Tanggal : 22 Juli 2019

Daftar Undangan Terlampir

A. Sekretaris Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
4. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

B. Sekretaris Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretaris Kabinet RI
2. Sekretaris Kementerian, Menteri Sekretaris Negara RI
3. Sekretaris Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Sekretaris Kementerian Koordinator, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertahanan
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama
11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
12. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
13. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
14. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
16. Sekretaris Jenderal, Kementerian Sosial
17. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan

18. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
19. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan
20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
21. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
23. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika
24. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
25. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
27. Sekretaris Jenderal,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
28. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB
29. Sekretaris Utama,Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
30. Sekretaris Jenderal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31. Sekretaris Jenderal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
32. Sekretaris Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi
33. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
34. Sekretaris Jenderal, Pariwisata Republik Indonesia

C. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Sekretaris Utama, Badan Arsip Nasional
2. Sekretaris Utama, Badan Ekonomi Kreatif
3. Sekretaris Utama, Badan Informasi Geospasial
4. Sekretaris Utama, Badan Intelejen Negara
5. Sekretaris Utama, Badan Keamanan Laut
6. Sekretaris Utama, Badan Kepegawaian Negara
7. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
8. Sekretaris Utama, Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Sekretaris Utama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
10. Sekretaris Utama, Badan Narkotika Nasional
11. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
12. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

13. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
14. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
15. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
16. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan
17. Sekretaris Utama, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
18. Sekretaris Utama, Badan Pusat Statistik
19. Sekretaris Utama, Badan SAR Nasional
20. Sekretaris Utama, Badan Standarisasi Nasional
21. Sekretaris Utama, Badan Tenaga Nuklir Nasional
22. Sekretaris Utama, Lembaga Ketahanan Nasional
23. Sekretaris Utama, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
24. Sekretaris Utama, Lembaga Sandi Negara
25. Sekretaris Utama, Lembaga Administrasi Negara
26. Sekretaris Utama, Perpustakaan Nasional

D. Sekretaris Daerah Provinsi

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
9. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
10. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
15. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali

18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
26. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
30. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat